

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata menjadi sektor andalan dalam pembangunan di Bali. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali cukup tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah wisatawan Mancanegara dan Nusantara, yakni dari sekitar 3.633.656 pada tahun 2000 menjadi 5.210.146 pada tahun 2012. Kedatangan wisatawan Mancanegara membawa dampak perolehan devisa masing-masing sebesar 865,078 Juta USD pada tahun 2000 menjadi 1,768 milyar pada tahun 2012 ( Dinas Pariwisata Bali, 2013).

Dibalik perkembangan yang signifikan tersebut, pariwisata Bali dihadapkan pada situasi pasar global yang dinamis terutama adanya perubahan orientasi pasar wisatawan. Dalam dua dekade terakhir, terjadi perubahan orientasi perjalanan wisata. Orientasi wisatawan tidak lagi pada produk konvensional yang menawarkan aktivitas rekreasi, akan tetapi, telah bergeser kepada produk khusus yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman, keunikan, keaslian, dan menghargai lingkungan dan budaya lokal ( Poon, 1993, dan Damanik, 2006). Ke depan, segmen pasar wisata akan terkait dengan motivasi untuk memperkaya wawasan, pengembangan kapasitas diri, petualangan, dan mempelajari kebudayaan lokal.

Kecendrungan tersebut berimplikasi dengan semakin tingginya minat wisatawan berkunjung ke wilayah-wilayah yang menawarkan atraksi wisata yang

berlokasi di pedesaan. Survey yang dilakukan *Countryside Commision*, melaporkan bahwa 84 persen, penduduk Inggris berlibur di wilayah pedesaan tiap tahunnya (Pigram, 1993). Penelitian Burton (1995) melaporkan bahwa kurang lebih 25 persen, masyarakat Eropa memilih berlibur di wilayah pedesaan. Di Perancis, 25 persen penduduk lokal berlibur di wilayah pinggiran kota dan 17 persen berlibur di daerah pegunungan. Tahun 1995, sejumlah 96 juta wisatawan menginap di wilayah pedesaan Inggris (Burton, 1995).

Berbagai studi yang mengindikasikan terjadinya perubahan orientasi wisatawan adalah (1) WTO melaporkan bahwa pada tahun 1999, jumlah perjalanan untuk *adventure tourism* mencapai 15 persen dari seluruh pangsa pasar pariwisata dengan tingkat pertumbuhan sebesar 35 persen per tahun. (2) Hasil visitor survey yang dilakukan di Costa Rica tahun 1991 menunjukkan bahwa 35 persen, wisatawan menyatakan alasan perjalanan wisatanya untuk mengunjungi objek ekowisata. (3) Forbes dan Forbes melaporkan bahwa dalam periode 1988--1998 telah terjadi peningkatan lebih dari 100 persen penerimaan yang diperoleh dari perjalanan wisata minat khusus (Nasikun, 1999).

Di Indonesia, hasil penelitian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001) mengenai “Studi Rencana Pengembangan Wisatawan Minat Khusus”, menunjukkan bahwa minat utama wisatawan mancanegara dalam kunjungannya ke Indonesia, 67,5 persen adalah melihat kebudayaan seperti melihat kehidupan asli penduduk lokal (28,7 persen), mengikuti upacara ritual (25,2 persen), melihat dan mempelajari kerajinan khas lokal (22,5 persen), menyantap makanan khas lokal (13 persen) dan menikmati dan mempelajari kesenian khas Indonesia (10,6

persen). Hal serupa terjadi di Bali, bahwa motivasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, 71,17 persen adalah daya tarik kebudayaan dan upacara adat (Dinas Pariwisata Bali, 2013). Pengembangan kawasan pedesaan sebagai objek wisata perlu ditindaklanjuti sebagai antisipasi pergeseran pola orientasi pasar wisata dunia.

Perubahan orientasi wisatawan menuntut adanya reorientasi dalam pembangunan pariwisata. Di Bali, kebijakan bidang kepariwisataan yang ditempuh pemerintah dalam mengantisipasi kecenderungan perubahan orientasi wisatawan adalah melalui pengembangan desa wisata. Dewasa ini, perkembangan desa wisata di Bali bertumbuh dengan cepat. Jika pada tahun 2000 jumlah desa wisata tercatat sebanyak 15 desa wisata, pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 53 desa wisata yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali ( Dinas Pariwisata Bali, 2013). Desa wisata merupakan jawaban atas perkembangan kecenderungan pasar wisata dunia. Sebaran desa wisata berdasarkan jenis wisata di Bali disampaikan pada lampiran 10.

Ada sejumlah alasan perlunya pengembangan desa wisata. *pertama*, pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara yang relevan untuk menjaring wisatawan yang berorientasi pada budaya, kemanusiaan, dan peduli pada masalah-masalah lingkungan. Pengembangan desa wisata secara umum lebih mengedepankan daya tarik berbasis nilai-nilai atau pandangan hidup masyarakat pedesaan. Dengan demikian, pariwisata dan kebudayaan dapat saling mendukung. *Kedua*, pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara untuk mengurangi konsentrasi keuntungan ke pihak lain dan membuka peluang bagi masyarakat

lokal untuk meraih keuntungan tersebut secara langsung melalui efek pengganda yang lebih tinggi. Logika yang dibangun adalah bahwa dengan pengembangan desa wisata, transaksi ekonomi dapat berlangsung didasarkan atas sumber daya masyarakat setempat. *Ketiga*, pengembangan desa wisata dapat merangsang pembangunan di pedesaan melalui tergalinya berbagai potensi yang belum mendapat perhatian. Hal ini juga dapat membuka pangsa pasar baru *alternative tourism* sebagai antisipasi kejenuhan terhadap berbagai bentuk wisata konvensional. Dengan demikian, pengembangan desa wisata merupakan upaya (1) pelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya masyarakat, (2) pengembangan masyarakat lokal termasuk di dalamnya memberi nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, dan (3) keuntungan/orientasi jangka panjang.

Konsekuensi logis dari pengembangan desa wisata, diperlukan pembenahan produk wisata dan kualitas layanan sesuai keinginan wisatawan. Pembenahan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata, karena sumber daya dan keunikan masyarakat lokal berupa elemen fisik dan non-fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada masyarakat tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung sumber daya pariwisata yang dikonsumsi wisatawan (Damanik, 2006). Hal senada diungkapkan oleh Wearing (2000), bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Menurut Nasikun (1999) mengatakan bahwa pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan

pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ada sejumlah alasan logis untuk meletakkan partisipasi masyarakat sebagai basis strategi pengembangan desa wisata. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, yang tanpa kehadirannya, program-program pengembangan desa wisata dipastikan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai program jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program, dan merasa memiliki program tersebut. *Ketiga*, partisipasi merupakan pemenuhan suatu hak demokrasi masyarakat sehingga pelibatan masyarakat secara penuh di dalam pembangunan merupakan bentuk pemenuhan hak demokrasi mereka sendiri (Conyers, 1991).

Isu partisipasi masyarakat di dalam pengembangan desa wisata juga sangat penting. Pengembangan desa wisata diharapkan mampu mendorong penguatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, baik secara sosial-budaya maupun ekonomi. Dalam konteks pembangunan pariwisata Indonesia, isu partisipasi masyarakat menemukan momentum yang tepat sejalan dengan berkembangnya pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan model pembangunan yang memperkuat kemampuan masyarakat pedesaan untuk mengelola sumber daya pariwisata dengan keterlibatan penuh dari masyarakat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata sering menimbulkan perbedaan yang kontras. Di Bali, misalnya,

pembangunan kawasan wisata Nusa Dua yang mulai direncanakan pada tahun 1980-an sangat mengabaikan partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal tidak berkekuatan untuk berpartisipasi secara aktif. Mereka tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan, dan bersikap pasif. Komunikasi dalam pembangunan dilakukan secara tidak langsung. Aliran informasi dan keputusan yang berkait dengan pembangunan mengalir deras dari atas. Tidak ada perjanjian antara pelaku pembangunan dan masyarakat lokal perihal keuntungan yang dapat dinikmati oleh keduanya. Kalau pun ada partisipasi masyarakat, ruang lingkungannya terbatas. Sering masyarakat lokal tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan apa yang sudah ditentukan oleh penguasa ( Madiun, 2008). Bukti penerapan konsep kekuasaan dalam pembangunan pariwisata di Nusa Dua ini adalah (a) tekanan dan berbagai ancaman yang dialami oleh masyarakat lokal serta proses penyerahan lahan kepada penguasa yang eksploitatif, (b) ketidakmampuan masyarakat lokal untuk menduduki posisi strategis di dalam pengelolaan kawasan pariwisata Nusa Dua, dan (c) kekuatan politik yang begitu dominan meminggirkan keinginan masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri (Madiun, 2008).

Kasus di Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak mampu memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi masyarakat lokal. Hal yang terjadi justru sebaliknya, yakni konflik yang intens dan berkepanjangan antara masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini bersumber dari perencanaan yang bersifat *top-down*, tidak partisipatif, dan meminggirkan aspirasi masyarakat. Kekuasaan pemerintah

(lokal) begitu kuatnya sehingga masyarakat Jatiluwih yang seharusnya diberdayakan menjadi diperdayakan. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis terhadap program desa wisata (Prasiasa, 2008).

Penelitian Dewi (2004) di tiga desa di kawasan wisata Lovina, Kabupaten Buleleng menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata sangat kecil. Masyarakat tidak dilibatkan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pengembangan kawasan. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha-usaha berskala kecil. Hal ini terlihat kontras dengan partisipasi masyarakat luar yang memonopoli usaha berskala besar. Di samping itu, pengelolaan pariwisata sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Keadaan ini menciptakan kerentanan masyarakat lokal dalam berhadapan dengan kaum kapitalis yang diterapkan tidak saja oleh pendatang, melainkan juga oleh produk kebijakan yang lebih bersikap prokelompok kapitalis tersebut.

Kasus yang sama juga terjadi di beberapa daerah lain. Di Kampung Naga, Jawa Barat, terjadi pengabaian kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi subjek pembangunan. Sejatinya masyarakat tersebut tidak menginginkan huniannya dijadikan sebagai objek wisata. Mereka menganggap bahwa keberadaan pariwisata dapat mengganggu kehidupan mereka, baik terhadap tempat tinggalnya, tatanan organisasi maupun pemenuhan afiliasi masyarakat Kampung Naga. Di pihak lain, pemangku kepentingan pariwisata mendorong Kampung Naga menjadi destinasi pariwisata karena berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ketika berhadapan dengan intervensi pihak

luar, masyarakat marah dan memprotes pemerintah. Seperti dapat diduga bahwa perlawanan tidak berhasil dan pada akhirnya masyarakat lokal harus tunduk pada kekuasaan (Wiyonoputri, 2005).

Kasus-kasus di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu poros penting di dalam pengembangan pariwisata terabaikan. Pengambilan keputusan yang bersifat *top-down* dan pemahaman yang rendah terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diduga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Partisipasi yang interaktif antara masyarakat lokal dan penguasa hampir tidak pernah terwujud, apalagi keinginan masyarakat untuk melakukan partisipasi dengan kekuatan sendiri tampaknya jauh dari harapan.

Beberapa penelitian lain mengungkapkan adanya kehadiran partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata, misalnya pengembangan desa wisata berbasis budaya di Desa Penglipuran, Bali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan pariwisata telah mendatangkan keuntungan ekonomi secara langsung. Hal itu telah menambah apresiasi masyarakat terhadap sumber daya alam dan budaya dan mereka pun makin termotivasi untuk melestarikannya (Arka 1999).

Penelitian yang mengungkapkan kehadiran partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata juga terjadi di beberapa wilayah lain, misalnya pengembangan desa wisata di Cibodas diklaim berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Pengaruh itu berupa terciptanya aktivitas wisata alam, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan perdagangan, dan



perluasan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh warga masyarakat, antara lain, adalah pemandu wisata, *porter*, pekerja *homestay*, pengelola kebun tanaman hias, penyedia jasa transportasi, pemilik warung makan, pedagang souvenir, penyedia jasa parkir, dan pengelola toko peralatan *camping* (Novianto, 2009). Keberadaan desa wisata di Cibodas telah mampu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal walaupun berskala kecil.

Pengembangan desa wisata di Kawasan Dieng diklaim dapat menciptakan peluang kerja dan peluang usaha bagi warga masyarakat lokal dalam pengelolaan bisnis wisata. Pekerjaan mereka yang semula terbatas pada kegiatan pertanian lambat laun berkembang ke pengelolaan *homestay*, kerajinan tangan, dan lainnya. Aktivitas ekonomi yang lahir dari kegiatan wisata pedesaan ini telah mampu memberikan sumbangan bagi ekonomi rumah tangga sehingga tidak hanya menggantungkan diri dari olahan pertanian berupa kentang.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata menyebabkan semakin banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan di lokasi sekitarnya, bermanfaat, dan mampu melibatkan masyarakat lokal. Namun, apakah semakin banyaknya aktivitas yang bermanfaat dan dapat melibatkan masyarakat lokal merupakan penguatan akar partisipasi masyarakat? Untuk membuktikan ada tidaknya partisipasi masyarakat perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan, Bali.

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Bali. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan menunjukkan peningkatan dalam dua dekade terakhir, yang ditandai, antara lain, oleh arus kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Tabanan. Pada tahun 2008 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tabanan tercatat sebanyak 2.285.000 orang. Angka ini meningkat mencapai 3.331.430 orang pada tahun 2012. Sektor pariwisata yang dilihat dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) berkontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2008 kontribusi PHR sebesar 22,15 persen, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 24,22 persen. Namun, peningkatan sektor pariwisata yang cukup signifikan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Kesempatan kerja di sektor pariwisata tercatat rendah. Pada tahun 2008 jumlah pekerja yang diserap pada berbagai usaha kegiatan pariwisata yang mencakup hotel berbintang, hotel melati, restoran, pondok wisata, biro perjalanan, dan wisata tirta sebesar 2.969 orang (6,20 persen dari total kesempatan kerja). Pada tahun 2012 angka ini menurun menjadi 2.666 orang (5,82 persen dari total kesempatan kerja). Bandingkan dengan sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 34,31 persen ( Tabanan Dalam Angka, 2013). Fenomena ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Tabanan cukup besar. Namun, partisipasi masyarakat lokal dalam bidang ini tergolong rendah.

Sebagai destinasi pariwisata, Kabupaten Tabanan memiliki keragaman daya tarik, baik daya tarik alam maupun budaya yang unik dan alami. Daya tarik

ini cocok untuk pengembangan desa wisata sebagai alternatif pengembangan pariwisata konvensional dan pemercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan cukup pesat. Pada tahun 2006, jumlah desa wisata di Kabupaten Tabanan tercatat hanya ada dua desa wisata, yakni Desa Wisata Candikuning dan Desa Wisata Kukuh. Pada tahun 2012, jumlah desa wisata meningkat menjadi lima desa wisata, yakni Desa Wisata Candikuning, Desa Wisata Kukuh, Desa Wisata Jatiluwih, Desa Wisata Beraban, dan Desa Wisata Pinge. Pada tahun 2015 ditargetkan desa wisata di Kabupaten Tabanan menjadi 12 desa wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2013).

Pada hakikatnya prinsip utama pengembangan desa wisata adalah (1) memomorsatukan proses pelibatan penduduk lokal dalam tukar gagasan, tindakan, pengambilan keputusan, dan kontrol dalam pengembangan pariwisata pedesaan,. (2) pengembangan desa wisata dalam skala kecil beserta pelayanan yang dekat dengan alam atau yang berada di dalam desa itu sendiri, (3) fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk secara individual atau bekerja sama, dan (4) pengembangan desa wisata didasarkan pada sifat budaya tradisional suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam. Dengan demikian, pengembangan fasilitas-fasilitas wisata diarahkan dalam skala kecil sehingga dapat dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk lokal ( Fandeli, 2003).

Namun, dalam realitas prinsip-prinsip tersebut tidak dipahami dan tidak terimplementasi dengan baik dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan. Fakta menunjukkan bahwa adanya pembangunan fasilitas wisata berupa

vila, hotel berbintang, dan restoran berskala besar di beberapa desa wisata seperti Bedugul, Candikuning, dan Jatiluwih. Pembangunan fasilitas berskala besar sudah jelas tidak dilakukan oleh masyarakat lokal. Ini artinya, ada penetrasi orang luar (investor) yang memanfaatkan peluang bisnis pariwisata di pedesaan. Fenomena ini dapat diartikan pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan belum berpihak pada masyarakat lokal.

Disamping itu, banyak fasilitas-fasilitas wisata itu dibangun di kawasan yang terlarang, misalnya pembangunan vila-vila di kawasan Bedugul, Tabanan. Vila-vila itu dibangun di wilayah resapan (konservasi) yang terlarang untuk pembangunan pemukiman atau berada di radius kesucian pura (kasus Jatiluwih). Pembangunan fasilitas-fasilitas wisata tersebut oleh masyarakat lokal diyakini telah melanggar *tri hita karana* karena bertentangan dengan konsep *tri mandala*. Secara ekologis pembangunan fasilitas wisata tersebut dikhawatirkan dapat berdampak negatif, yang dampaknya ditanggung masyarakat lokal berupa kerusakan aspek-aspek kehidupan, baik fisik maupun nilai sosial-budaya. Kerusakan ini sulit dipulihkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pembangunan fasilitas pariwisata yang salah konsep tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman para pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, padahal masyarakat Bali memilih Budaya sebagai dasar pengembangan pariwisata. Namun, para pengambil kebijakan tidak memahami makna dari pariwisata budaya. Mereka melihat dan memperlakukan pariwisata hanya sebagai komoditi bisnis untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Budaya yang bersifat abstrak seperti norma-

norma, *awig-awig*, filosofi agama Hindu dan sebagainya tidak banyak diimplementasikan dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian, ke depan dibutuhkan sumber daya manusia yang berpemahaman baik terkait kompleksitas pengembangan desa wisata. Dengan pemahaman yang baik, para pemangku kepentingan diharapkan mampu merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola sumber daya secara optimal sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Baik hasil penelitian terdahulu maupun prediksi-prediksi teoretik yang telah dipaparkan menawarkan sejumlah isu yang perlu diteliti lebih lanjut. *Pertama*, partisipasi masyarakat dan pariwisata merupakan konstruksi sosial yang dipahami secara berbeda oleh setiap komunitas sesuai dengan konstruksi sosial yang dibuatnya. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata haruslah dipahami dari perspektif pelaku, yaitu masyarakat lokal, bukan dari interpretasi pengambil kebijakan pembangunan. *Kedua*, partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata menampilkan dua sisi yang berbeda, dan diduga sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya kebijakan pemerintah, manajemen pengelolaan desa wisata, dan sosial-budaya. *Ketiga*, kedalaman partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata sulit diciptakan, kecuali jika mekanisme kelembagaan dan model manajemen sumber daya pariwisata lokal diterapkan secara konsisten.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan formulasi isu tersebut, penelitian ini mencari penjelasan-penjelasan empirik atas tiga pertanyaan berikut.

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan, Bali?
- b. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan, Bali?
- c. Pengelolaan sumber daya pariwisata seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan, Bali?

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya berikut.

- a. Menggali pengetahuan masyarakat di Desa Wisata Candikuning, Desa Wisata Kuku, dan Desa Wisata Jatiluwih atas keberadaan produk wisata (atraksi wisata, amenitas, dan aksesibilitas), sapta pesona, dan dampak pengembangan desa wisata terhadap lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat yang berfokus pada variabel mutu modal manusia, variabel motivasi, variabel kepemimpinan, variabel komunikasi, variabel sosial-budaya, variabel pemahaman dan variabel manajemen.

- c. Mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata yang mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan berikut.

- a. Mengkaji pemahaman masyarakat di Desa Wisata Candikuning, Desa Wisata Kukuh, dan Desa Wisata Jatiluwih atas keberadaan produk wisata (atraksi wisata, amenities, aksesibilitas), daya pesona, dan dampak pengembangan desa wisata terhadap lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan mengkaji pengaruh variabel mutu modal manusia, variabel motivasi sebagai faktor internal dan variabel kepemimpinan, variabel komunikasi, dan variabel sosial-budaya sebagai faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel pemahaman dan manajemen terhadap tingkat partisipasi masyarakat di tiga desa wisata di Kabupaten Tabanan Bali.
- c. Mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata yang mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Tabanan, Bali.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkontribusi terhadap penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, baik manfaat teoretis (manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan) maupun manfaat praktis bagi pembangunan masyarakat lokal. Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam hal memahami partisipasi masyarakat dari perspektifnya sebagai subjek pembangunan, dan alternatif terhadap paradigma pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada kebijakan birokrasi, pengambilan keputusan yang bersifat *top-down* dan sentralistis, tetapi menuju pembangunan yang berorientasi pada masyarakat lokal.
- b. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat lokal atas keberadaan desa wisata yang berlandaskan pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tersebut dapat memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain yang sejenis.
- c. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan teori tentang beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata seperti teori partisipasi, teori mutu modal, teori motivasi, teori kepemimpinan, dan teori komunikasi.
- d. Penelitian ini bermanfaat dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya pariwisata yang mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal,



memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antarberbagai elemen/unsur yang saling berinteraksi dan memengaruhi, berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan berkemitraan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.

- e. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya metode analisis yang digunakan dalam penelitian partisipasi masyarakat di bidang pariwisata, terutama aplikasi teknik statistik dengan Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* - SEM). Melalui penelitian ini metode SEM dapat diaplikasikan, terutama untuk mengamati faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi yang didasari oleh hubungan variabel yang cukup kompleks.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan terkait peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kesadaran kepada semua pihak terutama masyarakat di lokasi studi bahwa (1) mereka mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki untuk terlibat dalam setiap proses pengembangan desa wisata, (2) masyarakat punya kewenangan penuh dan akses untuk ikut memengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal, (3) mereka mampu melakukan kontrol terhadap kebijakan pariwisata terkait pengembangan desa wisata, dan (4) masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat ekonomi, dan sosial-budaya dalam pengembangan desa wisata.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata. Pihak terkait dapat berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Mereka dapat melakukan bimbingan dan pendampingan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pihak pemerintah bahwa melalui *bottom-up planning* yang diupayakan masyarakat dapat dihasilkan sebuah desa wisata yang tangguh dan mandiri. Misalnya, pengelolaan desa wisata yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Desa Kukuh ternyata mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Berbeda halnya pengelolaan melalui *top-down planning* yang dilakukan di Desa Candikuning dan Jatiluwih, ternyata tidak mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

#### **1.6 Pentingnya Penelitian ini dilakukan.**

- a. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan mengingat selama ini paradigma pembangunan yang ada lebih berorientasi pada birokrasi, bercorak pengambilan keputusan *top-down*, dan bersifat sentralistis. Dengan demikian, pemahaman mengenai partisipasi masyarakat cenderung dilihat dari perspektif pengambil keputusan, bukan dari perspektif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Akibatnya,

kebijakan pembangunan cenderung mengabaikan kemampuan masyarakat lokal sebagai aktor. Masyarakat lokal merupakan pihak yang termarginalkan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk membangun kekuatan masyarakat lokal terutama sebagai aktor pembangunan yang berkemampuan membangun wilayahnya.

- b. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat berperan penting dalam menunjang pengembangan desa wisata yang ditujukan untuk pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial-budaya, maupun ekonomi masyarakat. Namun, pembuktian empiris masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, kajian terhadap upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata perlu dilakukan.
- c. Usaha-usaha pengembangan desa wisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membangun kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif menjadi tuan rumah yang baik dan menyediakan produk wisata yang terbaik sesuai keinginan wisatawan.
- d. Kajian ini menarik dilakukan mengingat karakteristik wilayah Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia. Pemahaman konsep partisipasi menjadi sangat penting untuk diketahui dengan jelas, apakah partisipasi yang dilakukan masyarakat lokal tergolong partisipasi murni atau semu belaka. Untuk mencapai tujuan tersebut kajian-kajian terhadap upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata perlu dilakukan.

## 1.7 Keaslian Penelitian

Masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata berperan penting dan strategis bagi keberhasilan pengembangan pariwisata. Peran strategis tersebut dapat diemban oleh masyarakat lokal, jika memiliki pemahaman yang baik terkait hakikat dan dampak pembangunan pariwisata.

Penelitian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar, 2001) mengkaji “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pembangunan Kepariwisata di Indonesia”. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Lampung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Penelitian Depbudpar bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, persentase, dan tabulasi silang. Hasil penelitian Depbudpar menunjukkan bahwa (a) tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan di Indonesia secara umum masih rendah, dan (b) tingkat pemahaman masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan terkait dengan intensitas kegiatan pariwisata, keterlibatan masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat.

Ada perbedaan mendasar penelitian Depbudpar dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengkaji tingkat pemahaman masyarakat lokal atas keberadaan desa wisata. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wisata Candikuning, Desa Wisata Kukuh, dan Desa Wisata Jatiluwih Kabupaten

Tabanan, Bali. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan analisis skor, dan (b) mengkaji pengaruh tingkat pemahaman terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural.

Penelitian Soeroso (2007) mengenai “Penilaian Kawasan Pusaka Borobudur Terhadap Kebijakan Manajemen Ekowisata”. Penelitian Soeroso dilakukan di desa-desa sekitar kawasan Borobudur. Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup dan mengkaji model manajemen pelestarian kawasan Borobudur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan metode Delphi. Penelitian Soeroso menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat baru sampai pada tingkat eksistensi (rendah). Penelitian Soeroso ini juga merumuskan model manajemen pelestarian kawasan Borobudur dengan menitikberatkan sinergi antara manusia dan alam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh.

Perbedaan penelitian Soeroso dengan penelitian ini adalah (a) penelitian ini mengkaji tingkat pemahaman masyarakat atas keberadaan desa wisata. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, dan (b) penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian Kaharudin (2006) mengkaji “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Alam di Objek Wisata Lereng Selatan Gunung Merapi”. Lokasi penelitian dilakukan di Lereng Selatan Gunung Merapi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian Kaharudin adalah (a) mengetahui tingkat

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam, (b) mengetahui perbedaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam berdasarkan faktor sosial-ekonomi, dan (c) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam. Penelitian Kaharudin, menggunakan metode analisis pengharkatan, uji beda kruskal wallis, dan analisis regresi parsial. Hasil penelitian Kaharudin menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih tergolong rendah. Tidak terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berdasar pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Faktor sosial-ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tercatat hanya sebesar 4,2 persen, sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kelembagaan.

Perbedaan mendasar penelitian Kaharudin dengan penelitian ini adalah (1) penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dengan indikator sebagai berikut: (a) keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, (b) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (c) keterlibatan dalam memperoleh manfaat, (d) kesetaraan dalam kewenangan, (e) hak untuk menyampaikan aspirasi, dan (f) akses untuk ikut memengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya pariwisata. Metode analisis yang digunakan adalah analisis skor. (2) Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata yang berfokus pada variabel mutu modal manusia, variabel motivasi, variabel kepemimpinan, variabel komunikasi, variabel sosial-budaya, variabel

pemahaman, dan variabel manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural (SEM).

Penelitian Maryati (2005) mengkaji “Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata”. Penelitian Maryati dilakukan di Desa Putat, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tujuan penelitiannya adalah (a) mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, (b) mengetahui hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, dan (c) mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu program pelibatan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, persentase, dan tabel silang. Hasil penelitian Maryati menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih rendah. Hambatan dan keterbatasan utama yang dihadapi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah kurangnya keahlian di bidang pariwisata, kualitas sumber daya yang rendah, dan keterbatasan modal masyarakat. Beberapa faktor yang turut memengaruhi keberhasilan program pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata adalah dialog dengan umpan balik dari masyarakat, kejujuran dan keterbukaan, serta pelibatan dari awal dan komitmen terhadap masyarakat.

Perbedaan mendasar penelitian Maryati dengan penelitian ini adalah (1) penelitian ini mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dengan indikator sebagai berikut. (a) keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, (b) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (c) keterlibatan dalam memperoleh manfaat, (d) kesetaraan dalam kewenangan, (e) hak untuk menyampaikan aspirasi, dan (f) akses. Metode analisis yang digunakan adalah

analisis skor. (2) penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, yang berfokus pada variabel mutu modal manusia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, sosial-budaya, pemahaman, dan manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural (SEM).

Aryana (2006) meneliti “Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Wisata Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali”. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pamaron, Kabupaten Buleleng. Penelitian Aryana bertujuan untuk (a) mengkaji peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata, (b) mengkaji pemahaman aparat desa terhadap upaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pariwisata, dan (c) mengkaji proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pariwisata. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan distribusi persentase. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembangunan khususnya dalam perencanaan pariwisata, belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Pemahaman para aparat desa terhadap upaya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan cukup baik, tetapi sebaliknya pemahaman masyarakat tentang perlunya partisipasi dalam kegiatan perencanaan masih relatif rendah. Dalam hal pengambilan keputusan, penelitian Aryana menemukan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada persetujuan para anggota, tetapi pelaksanaannya dominan dilakukan oleh aparat pemerintah. Penelitian Aryana berfokus pada mengkaji partisipasi masyarakat dari aspek perencanaan dan tidak mengkaji dari aspek implementasi dan pengawasan.



Penelitian Puja Astawa (2000) mengkaji “Pola Pengembangan Pariwisata Bertumpu Pada Model Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian Puja Astawa dilakukan di desa–desa wilayah Bali Tengah. Tujuan penelitiannya adalah (a) mengidentifikasi sikap masyarakat terhadap rencana pengembangan pariwisata, (b) menetapkan model pengembangan kepariwisataan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan tabel distribusi tunggal. Hasil penelitian merumuskan model pengelolaan pariwisata di wilayah Bali Tengah dengan konsep keterpaduan antar unsur-unsur yang terlibat dalam objek pariwisata seperti desa adat, *subak*, pemerintah, dan pelaku pariwisata. Semua komponen yang terlibat secara bersama-sama mengelola objek dengan perannya masing-masing yang telah disepakati bersama.

Perbedaan mendasar penelitian Puja Astawa dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan berkemitraan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Secara umum ada perbedaan mendasar dari penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini. (1) penelitian ini cenderung memahami partisipasi masyarakat dari perspektif masyarakat, (2) penelitian ini berpendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik kuantitatif yang digunakan adalah teknik statistik dengan Model Persamaan Struktural (SEM). Teknik ini digunakan terutama untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, dan (3) penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata berbasis masyarakat,

berkelanjutan, dan berbasis kemitraan. Secara ringkas, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan itu terlihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Depbudpar (2001)	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pembangunan Kepariwisataaan di Indonesia.	Provinsi Lampung, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.	Mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataaan.  Mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat.	Metode analisis deskriptif, persentase, dan tabulasi silang.	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataaan di Indonesia secara umum masih rendah.  Tingkat pemahaman masyarakat dalam bidang pariwisata terkait dengan intensitas kegiatan pariwisata, tingkat keterlibatan, dan tingkat pendidikan masyarakat.
2	Soeroso.A. (2007)	Penilaian Kawasan Pusaka Borobudur terhadap Kebijakan Manajemen Ekowisata.	Kawasan Borobudur, Jawa Tengah.	Mengkaji pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup.  Mengkaji model manajemen pelestarian kawasan Borobudur.	Analisis faktor.  Metode Delphi.	Pemahaman masyarakat dengan indikator biogeofisik, ekonomi, dan sosial kebudayaan baru sampai tingkat eksistensi (rendah).  Model manajemen di Kawasan Borobudur perlu dilakukan secara holistik dengan menitikberatkan sinergi antara manusia dengan alam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh.
4	Maryati (2005)	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata.	Desa Putat, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.	Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Mengetahui hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.  Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu program pelibatan masyarakat.	Metode analisis deskriptif, persentase, dan tabel silang.	Menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih rendah.  Hambatan dan keterbatasan utama yang dihadapi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah kurangnya keahlian di bidang kepariwisataaan, kualitas sumber daya yang rendah dan keterbatasan modal masyarakat.  Beberapa faktor yang turut memengaruhi keberhasilan program pelibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata adalah dialog dengan umpan balik dari masyarakat, kejujuran dan keterbukaan, serta pelibatan dari awal dan komitmen terhadap masyarakat.

Tabel 1.1 (lanjutan)

5	Aryana (2006)	Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal.	Desa Pamaron, Kabupaten Buleleng.	<p>Mengkaji peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata.</p> <p>Mengkaji pemahaman aparat desa terhadap upaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pariwisata.</p> <p>Mengkaji proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pariwisata.</p>	Metode deskriptif, dan distribusi persentase.	<p>Proses pembangunan khususnya dalam perencanaan pariwisata belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.</p> <p>Pemahaman para aparat desa terhadap upaya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan cukup baik, tetapi sebaliknya pemahaman masyarakat tentang perlunya partisipasi dalam kegiatan perencanaan masih relatif rendah.</p> <p>Pengambilan keputusan didasarkan pada persetujuan para anggota, tetapi pelaksanaannya dominan dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal ini terjadi karena pada umumnya warga desa sangat jarang angkat bicara. Alasan jarang bicara ialah karena merasa minder karena kemampuan / pendidikannya rendah.</p>
6	PujaAstawa (2000)	Pola Pengembangan Pariwisata Terpadu Bertumpu pada Model Pemberdayaan Masyarakat.	Di desa –desa wilayah Bali Tengah (Desa Angseri, Baturiti, Penatahan, Wongaya Gede,Plaga,Petang, dan Melinggih.	<p>Mengidentifikasi sikap masyarakat terhadap rencana pengembangan pariwisata.</p> <p>Menetapkan model pengembangan kepariwisataan.</p>	Deskriptif analitik dengan tabel distribusi tunggal.	<p>Masyarakat di wilayah ini setuju dan menyambut baik bila wilayah Bali Tengah dikembangkan menjadi objek wisata.</p> <p>Sebagian masyarakat tidak keberatan bila orang luar desa atau orang luar Bali ikut serta dalam mengelola kepariwisataan di wilayah ini, namun di sisi lain ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pengelolaan kepariwisataan ini diserahkan kepada masyarakat setempat.</p> <p>Model pengelolaan pariwisata di wilayah Bali Tengah dengan konsep keterpaduan antara unsur-unsur yang terlibat dalam objek pariwisata seperti desa adat, <i>subak</i>, pemerintah dan pelaku pariwisata. Semua komponen yang terlibat secara bersama-sama mengelola objek dengan perannya masing-masing yang telah disepakati bersama.</p>

Tabel 1.1 (lanjutan)

7	Dewi, H.U Disertasi UGM (2011)	Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata.	Desa wisata Candikuning, Kukuh, dan Jatiluwih, di Kabupaten Tabanan, Bali.	<p>Mengkaji pemahaman masyarakat lokal atas keberadaan desa wisata.</p> <p>Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat lokal di dalam pengembangan desa wisata di Bali.</p> <p>Mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata yang mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal.</p>	<p>Statistik deskriptif.</p> <p>Model Persamaan Struktural (<i>structural Equation Model-SEM</i>).</p> <p>Deskriptif Kualitatif.</p>	
---	---	---	---	---	--	--